

RINGKASAN RKPD

**KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang termuat dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perencanaan pembangunan daerah merupakan fungsi yang sangat penting dan strategis karena dengan perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana, dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Proses penyusunan dokumen RKPD ini diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, Rancangan Akhir RKPD hingga ditetapkan menjadi peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2023 memuat permasalahan pembangunan yaitu kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat, isu strategis, visi, misi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam penyusunan RKPD ini mengacu pada RKP Nasional 2023, RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dan KUA PPAS dalam penyusunan APBD tahun 2023.

PRKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2026 dengan tema dan arah kebijakan pembangunan yaitu **“Pembangunan Infrastruktur Dasar dalam Mendukung Optimalisasi Pelayanan Dasar dan Pencapaian Daya Saing Daerah”**.

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023



PRIORITAS PEMBANGUNAN:



Pembangunan Infrastruktur Dasar



Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan



Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Sirkular



Pengembangan Produksi dan Hilirisasi Pertanian



Penguatan Tata Laksana Pemerintahan



Pengembangan UMKM dan Investasi



Pemeliharaan Ketertiban dan Kesatuan Bangsa



Pengembangan Inovasi Daerah

4 ISU STRATEGIS

1. Issu strategis bidang kesejahteraan rakyat :

- Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
- Tingginya angka putus sekolah
- Tingginya angka kematian ibu melahirkan
- Penanganan stunting
- Masih tingginya angka kemiskinan
- Rendahnya daya beli masyarakat
- Rendahnya pendapatan per kapita
- Belum optimalnya usaha peningkatan ketahanan pangan daerah

2. Issu strategis bidang pembangunan:

- Terbatasnya aksesibilitas wilayah
- Masih rendahnya akses sumberdaya air minum dan sanitasi layak
- Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan
- Minimnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana

3. Issu strategis bidang tata kelola pemerintahan:

- Belum optimalnya pelayanan publik
- Masih rendahnya nilai SAKIP daerah
- Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi
- Kurangnya Sumberdaya Manusia Aparatur sesuai kompetensi

4. Issu strategis bidang perekonomian:

- Belum optimalnya pengembangan dan pemasaran UMKM
- Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

- c. Masih rendahnya pengelolaan sector industri
- d. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber PAD

PROYEKSI INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL TAHUN 2023

No	Indikator	Satuan	Target 2023		
			RKP	RKPD Sulbar	RKPD Mamuju Tengah
1	Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,3-5,9	4,5-5,2	4,33
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,3-6,0	2,98	2,50
3	Tingkat Kemiskinan	persen	7,0-8,0	10,72	6,13
4	Rasio Gini	nilai	0,375-0,378	0,350-0,348	0,375
5	Indeks Pembangunan Manusia	nilai	73,29-73,35	68,16-68,18	67,14
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	persen	27,02	34,30	4

PROYEKSI KAPASITAS KEUANGAN DAERAH TAHUN 2022-2023

Proyeksi Pendapatan Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
4	PENDAPATAN	715.475.208.757,17	649.545.633.277,58	633.474.222.353,74	615.559.616.256,00	641.935.622.049,05
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.562.615.960,00	27.857.047.783,20	33.822.263.705,74	31.504.006.348,00	33.104.848.166,05
4 1 1	Pendapatan Pajak Daerah	7.808.115.520,75	8.173.327.535,00	8.361.506.340,00	11.993.858.368,00	13.033.740.397,40
4 1 2	Pendapatan Retribusi Daerah	16.990.331.273,00	12.074.923.953,00	15.108.513.769,60	16.196.958.500,00	15.240.655.920,00
4 1 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	990.000.000,00	2.640.000,000,00
4 1 4	Lain-lain PAD Yang Sah	7.764.169.166,25	7.608.796.295,20	10.352.243.596,14	2.323.189.480,00	2.190.451.848,65
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	642.515.983.259,17	600.287.407.494,38	580.984.896.648,00	559.325.940.573,00	602.435.003.083,00
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	623.546.804.337,00	581.361.538.137,00	559.918.359.802,00	537.759.475.490,00	580.868.538.000,00
4 2 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	18.969.178.922,10	18.925.869.357,38	21.066.536.846,00	21.566.465.083,00	21.566.465.083,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40.396.609.538,00	21.401.178.000,00	18.667.062.000,00	24.729.669.335,00	6.395.770.800,00
4 3 1	Pendapatan Hibah	25.661.622.338,00	21.401.178.000,00	0,00	0,00	0,00
4 3 3	Lain - Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan	14.734.987.200,00	0,00	18.667.062.000,00	24.729.669.335,00	6.395.770.800,00

Proyeksi Belanja Tahun 2023

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
BELANJA	759.368.309. 610,85	634.494.611. 139,50	607.650.823. 844,00	656.000.373. 747,00	650,435,622, 049.05
BELANJA OPERASI	504.702.676. 595,85	389.204.461. 093,50	392.671.540. 197,00	449.467.263. 052,00	428,502,622 ,008.53
Belanja Pegawai	183.447.976. 973,3	143.075.269. 307,00	155.051.511. 170,00	176.369.968. 597,00	191,410,195, 171.00
Belanja Barang dan Jasa	218.545.245. 624,5	224.981.111. 555,00	224.981.111. 555,00	246.329.459. 057,00	232,876,596, 929.53
Belanja Bunga	2.300.701. 998,00	3.468.231. 192,00	3.468.231. 192,00	2.000.000. 000,00	0,00
Belanja Hibah	6.209.900. 000,00	8.288.186. 280,00	8.288.186.2 80,00	24.417.835. 398,00	3,245,829, 908.00
Belanja Bantuan Sosial	3.770.500 .000,00	882.500. 000,00	882.500. 000,00	350.000. 000,00	970.000. 000,00
Belanja Bantuan Keuangan	90.428.352. 000,00				
BELANJA MODAL	254.507.814. 665,00	121.583.855. 006,00	121.583.855. 006,00	119.114.742. 695,00	132,594,626, 340.52
BELANJA TAK TERDUGA	157.818. 350,00	2.222.468. 641,00	2.222.468. 641,00	3.990.000. 000,00	5,500,000, 000.00
Belanja Tak Terduga	157.818. 350,00	2.222.468. 641,00	2.222.468. 641,00	3.990.000. 000,00	5,500,000, 000.00
TRANSFER	0,00	91.172.960. 000,00	91.172.960. 000,00	83.428.368. 000,00	83,838,373, 700.00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	91.172.960. 000,00	91.172.960. 000,00	83.428.368. 000,00	83,838,373, 700.00
JUMLAH BELANJA	759.368.309. 610,85	607.650.823. 844,00	607.650.823 .844,00	656.000.373. 747,00	650,435,622, 049.05

Proyeksi Pembiayaan Tahun 2023

URAIAN	REALISASI TAHUN 2019	REALISAI TAHUN 2020	REALISAI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	62.532.481. 444,99	18.639.380. 591,31	11.618.309. 281,39	22.506.124. 039,39	16,500,000 ,000.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.940.595. 044,99	18.639.380. 591,31	11.618.309. 281,39	5.000.000. 000	4,000,000 ,000.00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	54.591.886. 400,00	0,00	0,00	17.506.124 .039	12,500,000, 000.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	22.072.093. 448,00	0,00	24.166.665. 780,00	8,000,000, 000.00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,000, 000.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	1.000.000. 000,00	2.000.000. 000,00	3,000,00 000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	22.072.093. 448,00	22.072.093. 448,00	22.166.665. 780,00	0,00
PEMBIAYAANNETTO	62.532.481. 444,99	(3.432.712. 856,69)	(11.453.784. 166,61)	0,00	8.500.000. 000,00

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2023

No	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	15	103	171.656.380.665	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	24	115	145.115.700.000	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	12	64	54.588.182.116	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	20	77	170.567.363.447	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	20	87	23.804.400.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	13	53	10.688.200.000	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	12	51	7.977.149.992	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	14	37	4.660.937.355	DINAS SOSIAL
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	5	9	564.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6	14	19	969.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	15	68	6.719.198.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2	2	4	2.690.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	20	68	6.124.600.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	18	53	6.699.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3	9	41	3.594.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	2	3	6	9	12	21
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	15	74	10.274.537.014	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	15	35	6.359.374.000	DINAS PERHUBUNGAN

19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	11	65	10.310.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	0	0	0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5	5	10	2.222.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5	12	50	5.261.309.400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	3	8	22	5.920.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	5	360.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	2	5	550.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	4	7	1.690.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	9	37	3.184.649.402	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	5	9	720.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	21	62	16.178.500.000	DINAS PERIKANAN
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	18	71	19.001.204.874	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	21	67	14.719.849.884	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	16	51	7.661.516.357	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	2	8	5.659.558.800	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	2	3	6	9	12	21
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4	11	53	3.357.058.835	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
35	SEKRETARIAT DAERAH	3	20	74	45.557.394.797	SEKRETARIAT DAERAH
36	SEKRETARIAT DPRD	2	16	72	30.147.629.854	SEKRETARIAT DPRD
37	PERENCANAAN	3	14	45	4.596.169.275	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
38	KEUANGAN	4	15	118	27.615.431.447	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
39	KEPEGAWAIAN	2	12	39	5.023.318.508	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
40	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	2	159.207.070	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
41	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	3	6	727.867.485	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

42	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	43	8.286.345.286	INSPEKTORAT DAERAH
43	KECAMATAN	6	18	113	6.490.063.000	KECAMATAN PANGALE
44	KECAMATAN	6	16	61	2.113.449.468	KECAMATAN TOPOYO
45	KECAMATAN	4	11	28	1.626.516.000	KECAMATAN TOBADAK
46	KECAMATAN	5	13	39	2.379.818.867	KECAMATAN KAROSSA
47	KECAMATAN	6	17	67	4.515.683.000	KECAMATAN BUDONG- BUDONG
48	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	44	4.048.526.977	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK